

Bank Rakyat Indonesia di Masa Peralihan Orde Lama dan Orde Baru Tahun 1950-1970

Yusril Ashar Mahendra dan Ikhsan Rosyid Mujahidul Anwari¹

¹ Department of History Faculty of Humanities, Universitas Airlangga, Indonesia.
E-mail: ikhsan-r-m-a@fib.uanir.ac.id

Abstract This article aims to explore the historical role of BRI for the community as a bank born from Bumiputera during the transition from the Old Order to the New Order. Bank Rakyat Indonesia was originally a bank owned by the people of Purwokerto aiming for the credit system of the people of Purwokerto. The employment policy that caused the government to establish the BPP Bank Rakyat Indonesia to oversee the policies of Bank Rakyat Indonesia. The method used is a historical research method consisting of heuristic, verification, interpretation, and historiography. Accompanied by the collection of data that is a supporting source in the form of an annual report archive. Bank Rakyat Indonesia's policies from 1950 to 1970 resulted in Bank Rakyat Indonesia improving the credit system for rural communities, especially farmers and fishermen. Bank Rakyat Indonesia provides policies that aim to build economic dynamics by making efforts such as participation in a government program called BIMAS. This credit system has a positive impact on people who want to improve the village economy.

Keywords Credit, economy, society, and transition era.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dalam masyarakat dapat berlangsung karena kebutuhan terhadap badan yang berwenang menangani keuangan. Pemerintah Republik Indonesia telah membatasi kemampuan lembaga keuangan untuk melakukan operasi keuangan. Operasi keuangan itu dilakukan dalam bentuk penggalangan dan penyaluran dana kepada masyarakat umum guna membiayai investasi usaha seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990. Hanya saja, pembatasan ini tidak membatasi aktivitas pendanaan lembaga keuangan, tetapi hanya pada investasi korporasi ketika menyediakan pembiayaan untuk investasi korporasi (Izza,2018:22).

Pada masa itu bank-bank mengatur sistem keuangan yang terjadi pada suatu daerah. Berdirinya Bank Rakyat Indonesia bertujuan mendukung dan juga memberi pinjaman uang kepada masyarakat Purwokerto. Pada tahun 1894, pemerintah mendirikan *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* "Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi Purwokerto" (Apriyono,2015:16). Pada saat ini dikenal dengan nama Bank Rakyat Indonesia. Tujuan lembaga keuangan, adalah untuk melayani masyarakat Indonesia atau masyarakat adat. Tanggal resmi berdirinya *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* adalah 16 Desember 1895,

kemudian disebut sebagai hari lahir Bank Rakyat Indonesia. Disebut sebagai hari lahir Bank Rakyat Indonesia karena *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* merupakan Bank Belanda yang telah dinasionalisasikan oleh pemerintah setelah kemerdekaan pada tahun 1945 yang sekarang dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia.

Pemerintah mendesak bank ini untuk bergabung dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan selain mengganti namanya. Tiga bank BRI, BTN (Bank Petani dan Nelayan), dan NHM (*Nederlandsche Handels Maatschappij*) telah melakukan penggabungan. BKTN didirikan sesuai dengan undang-undang. Pemerintah memiliki BTN sebelum terbentuknya BKTN berkat Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1958. Pada tahun 1965 terjadi perubahan – perubahan struktur kelembagaan secara cepat pada Perusahaan perbankan milik pemerintah. Perubahan ini terjadi pada saat penpres baru saja berusia satu bulan. Pada saat itu pemerintah mengeluarkan penpres No. 17 tahun 1965 tanggal 27 Juli 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau biasa kita sebut BNI. Perjalanan Bank Rakyat Indonesia dalam upaya pembangunan perekonomian tidak lepas pada situasi dan juga kondisi perekonomian pada masa itu. Setelah masa orde lama, dan pada saat masuk pada Orde Baru tahun 1966 yang pada saat itu disebut dengan awal dalam melakukan perubahan fenomena yang terjadi pada bidang politik dan Ekonomi. Perubahan tersebut mampu mempengaruhi kebijakan dan kegiatan Bank Rakyat Indonesia yang pada saat itu bank milik Pemerintah. Dalam konteks itulah, artikel ini menghadirkan salah satu sisi kesejarahan dari perjalanan sebuah Bank Rakyat yang tumbuh dari aktivitas ekonomi yang berbasis pada rakyat dan ekonomi pedesaan atau agraris yang berbasis pedesaan.

Metode

Penelitian ini berfokus pada bidang ilmu sejarah, oleh sebab itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan penulisan ini adalah metode penulisan sejarah. Metode sejarah tersebut di mulai dengan melakukan pemilihan topik, melakukan pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005: 69). Topik yang dipilih tersebut mengambil mengenai Bank Rakyat Indonesia. Tahap kedua yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Pada penelitian ini sumber yang digunakan merupakan sumber primer yang diperoleh dari di Museum Bank BRI. Sumber primer merupakan sumber asli yang digunakan untuk bukti pada peristiwa seperti laporan tahunan, surat kabar, dan juga majalah. Selain sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Penelusuran sumber dilakukan di ANRI (Arsip Nasional RI) yang berada di provinsi DKI Jakarta da juga datang langsung ke Museum Bank BRI yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Tahap Ketiga pada penelitian ini adalah kritik sumber meliputi kritik internal dan kritik eksternal. Sumber yang dipakai penelitian telah diuji keaslian dan kredibilitasnya melalui tahap kritik tersebut, baik secara eksternal yang dikritik berdasarkan fisik dari sumber, jenis penulisan, tahun dibuatnya dan kertas yang digunakannya, serta diuji internal berdasarkan isi keabsahan sumber. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran makna fakta. Penulis melakukan analisis mengenai data yang telah ditemukan kemudian dihubungkan dengan makna satu fakta dengan fakta lainnya. Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi.

Hasil dan Pembahasan

Awal Munculnya Bank Rakyat Indonesia

“*De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*” merupakan nama Bank Rakyat Indonesia pada masa Hindia Belanda sebelum mengganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada saat itu ada seorang guru penduduk Banyumas mengadakan pesta tayuban secara besar-besaran dalam rangka mengkhitan anaknya. Para hadirin yang datang merasa heran mengapa seorang guru mampu mengadakan hajatan yang begitu mewah. Karena pada masa itu seorang guru ngaji tidak mampu menyelenggarakan hajatan yang begitu mewah. Ternyata biaya yang diperoleh oleh guru ngaji tersebut berasal dari uang milik Lintah Darat Orang Tionghoa dengan bunga tinggi, hal ini membuat Raden Bei memberikan penawaran pinjaman kepada guru ngaji tersebut yang dapat digunakan untuk membayar hutang kepada Orang Tionghoa tersebut tetapi dengan bunga yang rendah. Pada tahun 1895 Raden Bei mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* untuk menampung angsuran. Dengan dibangunnya *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto” menjadi embrio dari Bank Rakyat Indonesia pada masa kini. Bank ini pada awalnya merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat Indonesia atau orang-orang pribumi. Resminya, lembaga ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia hingga sekarang. Sebutan dari “*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*” ini terdiri dari *Hulp en Spaarbank* yang berarti bank bantuan dan simpanan, *der* merupakan gabungan dari istilah *van* dan *de* yang berarti milik atau dimiliki *inlandsche Bestuurs Ambtenaren* mengacu pada anggota staf pangreh praja asli (Indonesia) yang memegang posisi kepala. Setelah W.P.D. de Wolff van Westerode menggantikan Asisten Residen Banyumas, E. Siburgh, pada tahun 1897, Bank ini mengalami reformasi (Humas BRI,1995: 7-9).

Praktek seperti itu kemudian dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain, terutama pada level kabupaten. Prakarsa asisten residen ataupun bupati setempat sehingga didirikanlah bank-bank serupa yang juga disebut sebagai bank “Priyai”. Untuk melakukan proyeksi *Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouw Credietbank* menjadi sentral bank-bank yang telah diuraikan pada sebelumnya. Kemudian De Wolff mulai membentuk lembaga-lembaga perkreditan di pedesaan. Perhatian De Wolff yang besar terhadap Lembaga pengkreditan rakyat meyakinkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900 untuk menunjuk De Wolff secara khusus menangani masalah dan pembentukan lembaga-lembaga perkreditan baru. Bank-bank kredit rakyat yang dimiliki oleh pemerintah dikenal sebagai *volkscredietwezen* yang terdiri dari *afdeelingbank* (Badan Kredit Kabupaten) dan *Dorpscrediet Instelling* (Badan Kredit Desa). Dampak dari depresi ekonomi membuat *afdelingbank* mengalami kemunduran dalam melakukan pengkreditan pada masyarakat. Pada tahun 1934 mengalami titik terendah sehingga pada tahun tersebut hanya menyalurkan kredit sebesar f. 15,46 juta, tentu saja hal itu merupakan penurunan yang begitu tajam. Tahun 1929 *afdelingbank* telah berhasil memberi pinjaman kepada nasabah sebanyak f. 74,87 juta. Tentu saja hal tersebut membuat jual kredit yang telah disalurkan kepada nasabah hanya kurang dari 20% dibandingkan tahun 1929 (Rinardi,2021: 136).

Pada masa penjajahan Jepang, cabang-cabang kesatuan A.V.B terhubung dengan organisasi pemerintah militer Jepang yang dipecah menjadi 3 bagian yaitu Sumatera, Sulawesi, dan Jawa *Syomin Ginko*. Pekerjaan *Syomin Ginko* pada daerah-daerah ditentukan di Jawa. Pada awal dibukanya *Syomin Ginko*, membuat pandangannya bahwa pemerintah seolah-olah memiliki perhatian pada *Syomin Ginko*, karena saat permulaan pengkreditan kepada penduduk dan juga pegawai yang merupakan bagian pokok dari pengkreditan A.V.B terus saja mengalami kemunduran. Meskipun *Syomin Ginko* memiliki sifat kredit yang bertujuan untuk membantu usaha peperangan tetapi pegawai *Syomin Ginko* mendapatkan manfaat berupa pengalaman yang berharga. Pada masa awal kemerdekaan, "Bank Rakyat Indonesia" menjadi Bank yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia hal tersebut terdapat pada PP RI No. 1 Tahun 1946.

Pada masa permulaan kemerdekaan Indonesia kondisi keuangan Bank Rakyat Indonesia relatif baik. Selain membantu pemerintah pada masa perjuangan Bank Rakyat Indonesia juga melakukan pelayanan meskipun masih relatif sederhana tetapi mampu membantu masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat pedesaan, serta pengusaha menengah dan nasional. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintah yang memiliki kedudukan khusus dalam pengkreditan yang mampu memberikan pinjaman ataupun modal baik bagi kalangan menengah ataupun masyarakat kecil seperti petani. Modal usaha tersebut dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan hidup yang tentu saja mampu berdampak kepada pendapatan perkapita penduduk yang mampu untuk menunjang pendapatan nasional dan memicu adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kondisi ekonomi yang terjadi pada Indonesia telah mengalami kekacauan sehingga hal tersebut membutuhkan penanganan segera untuk melakukan pertahanan kekuatan ekonomi Indonesia.

Aktivitas Bank di Indonesia Sampai Awal Orde Baru

Kehadiran institusi perbankan pertama di Indonesia tentu saja tidak luput dari pengaruh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*. Guna memperlancar dan juga mempermudah aktivitas perdagangan, VOC mendirikan *De Bank van Leening* yang didirikan pada tahun 1746. Bank ini mengalami krisis keuangan yang membuat bank tersebut ditutup. Untuk mempertahankan keberlanjutannya, Bank ini kemudian mengalami peleburan menjadi *De Bank van Courant* yang didirikan pada tanggal 1 September 1752. *De Bank van Courant* merupakan bank pertama di Nusantara yang bertujuan untuk menunjang perdagangan pada tahun 1752 (Ginting,2015:19).

Dalam perkembangannya pasca VOC, dibentuk bank yang melayani peredaran uang atau bank sirkulasi. Pembentukan bank sirkulasi di Hindia Belanda digagaskan pada saat Komisaris Jendral Hindia Belanda Mr. C.T. Elout datang ke Hindia Belanda, karena pada saat itu Hindia Belanda menganggap kondisi keuangan memerlukan adanya ketertiban dan juga pengaturan sistem pembayaran (Anwari,2016,hlm.41). Kemudian pada tanggal 11 Desember 1827 komisaris jendral Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan No. 28 tentang oktroi dan ketentuan-ketentuan mengenai pendirian bank yang diberi nama *De Javasche Bank*. Pada awal berdirinya pemerintah Belanda dan Raja Willem menghendaki adanya bank swasta yang memiliki tujuan mengatur keuangan Hindia Belanda yang sedang mengalami kesulitan akibat kekurangan mata uang (Arjasari,1994: 74). Hal ini tentu saja kewajiban *De Javasche Bank* yang berperan sebagai

bank siklus untuk memperbaiki peredaran uang di Hindia Belanda karena tidak seimbangnya peredaran antara uang perak dan uang tembaga.

Pada masa pemerintahan Jepang, *De Javasche Bank* dan juga bank lainnya telah mengalami likuidasi, pada saat itu militer Jepang juga mengumumkan *Nanpo kaihatsu Ginko* sebagai Bank Sirkulasi di Asia tenggara yang pada saat itu telah di duduki oleh Jepang. Beberapa pekerja DJB kembali dipekerjakan untuk menjalankan tugasnya sebagai karyawan Bank dikarenakan kekurangan pegawai yang terampil dalam menjalankan roda perbankan, tetapi status mereka merupakan tahanan. Setelah tugas mereka sebagai karyawan Bank mereka dikembalikan lagi ke ruang tahanan. Para tahanan ini sering disiksa dan dicaci dikarenakan perbuatannya dinilai menggagalkan Jepang untuk menguasai cadangan emas DJB (Apriyono,2015:30).

Menjelang dan masa Perang Dunia II, pemerintah Hindia Belanda melikuidasi tiga bank yang beroperasi. Likuidasi itu dilakukan karena Jepang telah berkuasa atas Asia Pasifik. Kondisi itu membuat bank-bank Belanda, Inggris, dan Bank Cina juga ikut dilikuidasi oleh pemerintahan militer Jepang. Semua bank pada masa itu ditutup tidak terkecuali *Algemeene Volkscrediet Bank* (Bank Rakyat Indonesia). Pada masa Jepang, *Algemeene Volkscrediet Bank* diganti nama menjadi *Syomin Ginko* (Humas BRI,1995:23). Pada masa Indonesia merdeka atau mulai 17 Agustus 1945, situasi baru memberikan angin segar bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu aspek yang diperhatikan untuk dikembangkan adalah perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah melakukannya dengan menasionalisasi perbankan Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempercepat stabilisasi perekonomian adalah dengan mengambil alih kendali sektor perbankan di Indonesia. *Syomin Ginko* merupakan salah satu bank yang akan diambil alih oleh pemerintah, namun tentunya terdapat tantangan tersendiri dalam prosesnya. Pemerintah Jepang tidak mau menyerahkan *Syomin Ginko* begitu saja karena mempunyai tugas menjaga “status quo” dari sekutu. Pelayanan dalam pengkreditan pada pemerintah Jepang tidak berubah karena sistem kerja sama dengan AVB (*Algemeene Volkscrediet Bank*) dalam hal ini tidak mengalami perubahan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang ekonomi dan diteruskan oleh Jepang. Penurunan mata uang yang terus merosot membuat Bank Rakyat Indonesia tidak bisa mengeluarkan suku bunga secara terus-menerus hal ini tentu saja membuat beban bagi masyarakat uang terus memburuk dan bernasib yang menyedihkan. Akibat dari penurunan mata uang tersebut membuat persediaan padi pada lumbung desa harus dijual kepada pemerintah militer Jepang dengan harga yang sangat murah.

Pada masa Soekarno, pemerintah mengeluarkan peraturan dan undang-undang untuk mengatur sektor perbankan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kestabilan sektor perbankan dan mencegah tindakan yang merugikan bagi masyarakat. Selama periode ini, perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa bank swasta didirikan, dan peran perbankan dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi semakin penting. Pada periode ini juga perubahan dalam struktur kepemilikan bank berubah karena bank swasta mulai dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1950, pemerintah mendirikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai bank yang fokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Bapindo menjadi salah satu institusi keuangan penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Pada Tahun 1953, pemerintah Indonesia mendirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Bank ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas mata uang rupiah. Pada awal 1960-an, pemerintah Orde Lama melakukan nasionalisasi beberapa bank asing yang beroperasi di Indonesia. Ini termasuk bank-bank Belanda seperti *De Javasche Bank*, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Era Orde Baru yang dimulai di bawah pemerintahan Soeharto membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi, termasuk dalam sektor perbankan, yang akan berlanjut hingga tahun 1998 ketika Orde Baru runtuh.

Pada tahun 1965, aktivitas perbankan dikendalikan melalui peran Bank Indonesia. Kebijakan mengenai perbankan dikontrol melalui pengetatan moneter dengan tujuan mengatasi masalah makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang beredar dan mengontrol pertumbuhan ekonomi. Situasi yang tidak normal di awal tahun 1960an, seperti terjadinya hiperinflasi ikut memperburuk perekonomian Indonesia. Akibatnya, pendapatan per kapita turun ke titik terendah dari lima tahun sebelumnya. Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan sebagai dampak dari sektor pertanian yang tidak cukup memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Leirissa, dkk.,1996: 100).

Kebijakan Bank Rakyat Indonesia Pada Perekonomian Indonesia

Dalam melakukan penstabilan perekonomian, Bank Rakyat Indonesia membuat kebijakan yang bertujuan untuk membantu memberi pinjaman atau kredit kepada petani dan nelayan. Pada masa ini peran Bank Rakyat Indonesia terlihat dalam membantu masalah keuangan pemerintah membuat pemerintah melebur Bank Rakyat Indonesia menjadi BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan) guna untuk membantu para petani dan nelayan memenuhi kebutuhan mereka. Pada kondisi tersebut membuat keuangan Bank Rakyat Indonesia mengalami kestabilan karena banyaknya para petani dan nelayan melakukan pengkreditan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi tidak seperti lintah darat itu yang terlalu menyiksa para nelayan dan petani dengan bunga yang tinggi, bank BKTN (Bank Koperasi Tani dan Nelayan) memberikan bunga yang rendah sehingga tidak begitu membuat para petani dan nelayan tercekik akibat hutang mereka.

Dalam keterlibatan Bank Rakyat Indonesia dalam hal pembangunan, pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia membuat program untuk membantu kelancaran dalam perekonomian Indonesia. Program tersebut adalah Program Bimas (bimbingan masal) di mana program ini untuk menjangkau masyarakat secara luas. Peran Bank Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya bank yang ditugaskan menyalurkan kredit program Bimbingan Masal. Keterlibatan BRI pada program ini yaitu sebagai agen dalam melakukan pembangunan yang sudah dilakukan saat Bank Rakyat Indonesia ditunjuk sebagai bank yang menjalankan fungsi menyalurkan kredit Program Bimbingan Masal. Program Bimas ini merupakan program yang berorientasi pada pembangunan pertanian secara umum dan juga swasembada beras. Program ini merupakan program bimbingan yang berhubungan dengan aplikasi ilmu dan juga teknologi dalam hal untuk mencapai hasil yang optimal (Ashari,2009: 27).

Program Bimas mulai dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1967. Pada perkembangannya, program ini berganti nama menjadi Program Bimas *Gotong-Royong*. Penggantian nama dan fungsi program ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengimpor pupuk. Bank Rakyat Indonesia pada program mewujudkan pada penyiapan pendanaan dengan sasaran meningkatkan produksi beras yang berasal dari petani. Tujuan lainnya adalah memperluas produksi pangan dari sektor pertanian. Usaha yang dilakukan pemerintah tepat dalam menjadikan Program Bimas ini sebagai program nasional. Pendekatan Program Bimas ini ditujukan sebagai program yang mampu mewujudkan Pembangunan pertanian pada umumnya dan program swasembada. Program ini berjalan dengan lancar karena dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan pembiayaan dengan bantuan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lancarnya program ini berlanjut sehingga pada tahun 1969-1970 Program Bimas ini diganti lagi menjadi Program Bimas yang disempurnakan. Pada program ini Bank Rakyat Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pembiayaan

Pada permulaan tahun 1953 pemerintah membentuk Badan Pengawas dan Pembantu untuk Bank Rakyat Indonesia. Anggota dari BPP (Badan Pengawas dan juga Pembantu) Bank Rakyat Indonesia terdiri dari menteri-menteri pada pemerintahan, seperti R.S. Soeri Atmadja, yang pada saat itu sebagai Direktorat Perekonomian Rakyat. R.S. Soeri Atmadja pada pemerintahan Soekarno menjabat sebagai wakil Kementerian Perekonomian. Dalam organisasi BPP (Badan Pengawas dan juga Pembantu) menjabat sebagai ketua. Adapun perwakilan kementerian pertanian, dimasukan sebagai anggota dalam tubuh BPP. Wakil kementerian dalam negeri juga ditempatkan sebagai anggota pada organisasi yang sama. Posisi sebagai anggota juga berasal dari perwakilan para pedagang menengah seluruh Indonesia (Arsip Laporan BRI, 1953: 9). Keputusan BPP Bank Rakyat Indonesia ini tentu saja mampu membantu pemulihan kondisi internal di kalangan para pegawai Bank Rakyat Indonesia. Pada saat rapat BPP yang diadakan pada tahun 1953 membahas dua agenda yaitu, peninjauan usaha pinjaman Bank Rakyat Indonesia dan peraturan pensiun untuk pegawai Bank Rakyat Indonesia yang bukan pegawai Negeri. Hasilnya adalah memberikan tunjangan adisional kepada pegawai Bank Rakyat Indonesia yang disetujui oleh Kementerian Perekonomian dan Keuangan. Hasil lainnya adalah lahirnya aturan pensiun bagi pegawai Bank Rakyat Indonesia.

Pada tahun 1954 telah ada penambahan pegawai pada Kantor Besar maupun kantor cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia. Tahun 1953 pada Kantor Besar memiliki jumlah pegawai 250 orang pada tahun 1954 bertambah menjadi 281 orang pada kantor cabang-cabang juga bertambah yang pada tahun sebelumnya berjumlah 2323 pegawai pada tahun 1954 mencapai 2442 pegawai tentu saja hal ini bertujuan memperkuat pimpinan umum agar bimbingan terhadap cabang-cabang menjadi lebih sempurna. Pegawai penunjang yang memperlancar kinerja perusahaan adalah pengangkatan sopir. Pegawai tata usaha juga diangkat untuk menunjang proses administrasi dan birokrasi di lingkungan BRI sejak tahun 1954. Dengan kelengkapan itu, maka struktur organisasi perusahaan semakin kuat (Arsip Laporan BRI, 1954: 15).

Pada saat itu, hak-hak pekerja dan hubungan industrial mungkin belum sepenuhnya diatur dengan baik seperti yang terjadi saat ini. Organisasi serikat pekerja dan hak-hak pekerja tidak sekuat yang ada sekarang. Perlu diingat bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan perbankan di Indonesia pada tahun 1956 sangat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Indonesia sebagai

negara, kesejahteraan pekerja di Bank Rakyat Indonesia dan sektor perbankan secara keseluruhan telah mengalami perubahan signifikan selama puluhan tahun terakhir. Tentu saja pada tahun tersebut Bank Rakyat Indonesia juga memikirkan mengenai tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan Anak pada pegawai Bank Rakyat Indonesia dan juga Tunjangan Istri pegawai Bank Rakyat Indonesia juga memikirkan hal seperti itu. Pada tahun 1961 Bank Rakyat Indonesia memberikan laporan data mengenai tunjangan daerah dan juga tunjangan umum. Pada Tahun 1970 jumlah pegawai meningkat yang memiliki jumlah pegawai pada saat itu mencapai 9.949 orang, yang dimana pada tahun 1969 berjumlah 8.006 orang. Pada jumlah tersebut tentu saja terbagi dari jumlah pegawai di kantor besar dan cabang-cabang yang ada pada seluruh Indonesia. Pada kantor besar sendiri berjumlah 1.446 orang dan sisanya bekerja pada kantor cabang yang ada pada seluruh Indonesia (Arsip Laporan BRI, 1970: 22).

Aktivitas Kredit Bank Rakyat Indonesia

Pada tahun 1950, aktivitas perbankan yang dijalankan Bank Rakyat Indonesia berfokus pada pemberian kredit usaha pertanian di pedesaan. Tujuannya adalah memperluas dan meningkatkan produksi pertanian yang berasal dari pedesaan. Sasaran kredit pertanian dalam perjalannya tidak selalu mulus. Hal itu tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, kemampuan pegawai yang tidak merata dan masih lemahnya kemampuan pegawai ikut menentukan khususnya yang berkaitan dengan jangkauan dan serapan kredit. Sementara faktor eksternal lebih berhubungan dengan keadaan sosial politik Indonesia yang semakin memburuk akibat krisis politik di tahun 1950an sampai 1960an. Pengaruh dari krisis ini tidak saja melanda pada aktivitas bank, namun juga lebih pada aktivitas utama bank seperti kredit atau usaha simpan pinjam BRI untuk masyarakat.

Pengkreditan yang terjadi kepada masyarakat desa tetap mendapat perhatian sepenuhnya dari Bank Rakyat Indonesia, dikarenakan besarnya kebutuhan kredit oleh golongan menengah, tak dapat dihindarkan. Pada tahun 1951-1952 kredit usaha lebih banyak diberikan kepada kalangan kelas menengah. Kelas menengah ini menjadi perhatian sepenuhnya di Bank Rakyat Indonesia agar terbentuk struktur ekonomi yang kuat. Kelas pengusaha muncul dari kelas menengah ini. Pada 1955 perkembangan konjungtur ekstern menguntungkan bagi usaha pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam lapangan ekonomi di negara berkembang. Peran tersebut sebagai "*Agent of Development*" dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tindakan pemerintah itu ikut mempengaruhi lalulintas keuangan dan peredaran barang-barang sebagai tolok ukur perkembangan perekonomian. (Arsip Laporan BRI, 1955: 15-16). Pada bulan September 1955, kabinet baru telah mengambil tindakan-tindakan di sektor keuangan dan juga barang-barang yang prinsipil untuk meningkatkan posisi ekonomi Indonesia.

Perkembangan usaha kredit BRI tahun 1951-1952 relatif menggembirakan, tetapi kegembiraan tersebut tidak berlanjut dikarenakan situasi keamanan yang terjadi pada tahun 1953 memburuk. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama pengkreditan mulai membaik kembali saat memasuki semester II tahun 1955. Sebagai Lembaga yang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dan juga berkembang membuat Bank Rakyat Indonesia terus meningkat peranannya dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Upaya yang dilakukan dalam melakukan peningkatan tersebut adalah meningkatkan pelayanan dan keragaman usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Yang pada hal tersebut dikaitkan pada surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956 yang sudah terhitung sejak tanggal 25 September 1956 dan ditetapkan sebagai Bank Devisa. Hal tersebut ditetapkan karena Bank Rakyat Indonesia memiliki begitu banyak kantor cabang yang sudah tersebar di Indonesia sehingga mampu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih merata kepada nasabah yang bergerak pada bidang perdagangan luar negeri.

Pada tahun 1970 pengkreditan perkembangan begitu pesat hal ini dikarenakan dana-dana yang menyebabkan pengkreditan Bank Rakyat Indonesia begitu pesat. Dana-dana tersebut masuk karena adanya jumlah giro, deposit, dan tabungan yang masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia. Pada giro sendiri dana Bank Rakyat Indonesia mencapai Rp. 29.201 juta, pada deposito sendiri dana Bank Rakyat Indonesia mencatat jumlah Rp. 5.797 juta, sedangkan pada tabungan mencapai Rp 425 juta atau 1,46% dari jumlah seluruh dana Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun ini pengkreditan mulai banyak dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan dari segala sektor. Peningkatan pinjaman Bank Rakyat Indonesia mampu untuk biaya dengan likuiditas sendiri banyak Rp. 18.987,9 juta dan likuiditas Bank Indonesia yang mencapai Rp. 30.068,7 Juta. Pada pengkreditan Bimas dilakukan pelaksanaan pembiayaan secara keseluruhan dengan likuiditas Bank Indonesia (Arsip Laporan BRI,1970: 15-16).

Kesimpulan

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik pemerintah yang mampu memberikan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Peran itu dapat dilihat dari tahun 1950, kegiatan yang dijalankan Bank Rakyat Indonesia relatif meningkat dan jauh lebih baik kondisinya, jika dibandingkan dengan periode 1940. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam sektor ekonomi negara tertinggal. Peran tersebut sebagai “Agent of Development” dalam memperbaiki situasi dan kemampuan ekonomi, khususnya pada sektor perbankan. Pada perkembangannya, lembaga perkreditan Bank Rakyat Indonesia mengalami kemajuan berarti, tetapi untuk melayani masyarakat desa belum maksimal. Keterlambatan tersebut disebabkan Masyarakat desa yang luas dan sulit terakses akibat berbagai keterbatasan seperti infrastruktur dan hambatan lain yang menghambat mobilitas. Akan tetapi, pada perkembangannya, pengkreditan BRI pada tahun 1951-1952 cukup menggembirakan, hanya saja kegembiraan tersebut tidak lama karena situasi keamanan yang terjadi pada tahun 1953 memburuk. Pada tahun 1970 perkembangan membaik dikarenakan dana-dana yang menyebabkan pengkreditan Bank Rakyat Indonesia mulai pulih. Dalam upaya pengelolaan internal, BRI memiliki kebijakan dengan membentuk BPP (Badan Pengawas dan Pembantu). Tujuan dibentuknya BPP (Badan Pengawas dan juga Pembantu) Bank Rakyat Indonesia tentu untuk membuat anggaran belanja dan rencana pekerja yang tentu saja harus mendapat persetujuan BPP (Badan Pengawas dan juga Pembantu) Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1954 telah ada penambahan pegawai pada Kantor Besar maupun kantor cabang-cabang yang ada di Seluruh Indonesia. Pada Tahun 1970 jumlah pegawai meningkat yang memiliki jumlah pegawai pada saat itu mencapai 9.949 orang, yang

dimana pada tahun 1969 berjumlah 8.006 orang. Pada jumlah tersebut tentu saja terbagi dari jumlah pegawai di Kantor besar dan cabang-cabang yang ada pada seluruh Indonesia.

References

- Anwari, Ikhsan, 2016, “Kebijakan Perekonomian Gemeente Surabaya Tahun 1906-1942”, *Penelitian*, (Surabaya: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Airlangga).
- Apriyono, Phutut, 2015, “Dinamika Bank Rakyat Indonesia Tahun 1946-1965 (Kajian Sejarah Lembaga Pengkreditan di Purwokerto)”, *Skripsi*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret).
- Ariasari, 1994, “De Javasche Bank dan Penyediaan Modal di Jawa Pada Masa Tanam Paksa (1830-1870)”, *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia).
- Arsip Bank Rakyat Indonesia, *Laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 1953 bagian pengkreditan dan lain-lain usaha bank*.
- Arsip Bank Rakyat Indonesia, *Laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 1954 bagian pengkreditan dan lain-lain usaha bank*.
- Arsip Bank Rakyat Indonesia, *Laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 1970 bagian pengkreditan dan lain-lain usaha bank*.
- Arsip Bank Rakyat Indonesia, *Laporan Bank Rakyat Indonesia tahun 1955 bagian pengkreditan dan lain-lain usaha bank*.
- Ashari, 2009, “Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia” dalam *jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 7 No. 1,
- Ginting, Jamin, 2015, *Pengertian dan Sejarah Bank di Indonesia*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Hikmah, Citra Nur, Abrar.M., Hasmi Yanuardi, 2020, “Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950)”, dalam *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* Vol. 2 No. 1.
- Izza, Aqidatul, 2018, “Peran Historis Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1, No. 1.
- Kuntowijoyo, 2005, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng.
- Nn., 1995. *Seratus Tahun Bank Rakyat Indonesia 1895 – 1995*. Purwokerto: PT BRI.
- Rinardi, Haryono, 2012, “Lembaga Pengkreditan Masa Kolonial”, dalam *Jurnal LITERASI*, Vol. 2, No. 2.